



2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



Concurrent Session-3:
Melakukan Audit Sektor Publik :
Mengelola Ekspektasi dan
Memberikan Hasil



DISAJIKAN OLEH :
Alexander Zulkarnain
INSPEKTUR
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

ALEXANDER ZULKARNAIN



Adalah seorang auditor internal pemerintah dengan jabatan saat ini Inspektur pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Berpengalaman melakukan audit dan penugasan asurans lainnya pada sektor publik dan sektor korporasi.

Pengalaman di sektor publik lebih dari 27 tahun dalam penugasan asurans yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, kinerja, dan audit tujuan tertentu, serta penugasan konsultasi berkenaan dengan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.

Pengalaman di sektor korporasi lebih dari 14 tahun menjadi Komite Audit pada salah satu bank terbesar dan sebuah perusahaan finansial.

Memperoleh gelar Doktoral dalam bidang HRM, Magister dalam bidang *Finance*, dan D4 dalam bidang Akuntansi.

Sertifikasi profesional yang diperoleh meliputi *Certified Internal Auditor*, *Certified in Control Self Assessment*, *Chartered Accountant*, dan Manajemen Risiko.

Keanggotaan profesi termasuk dari Ikatan Komite Audit Indonesia, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.



2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN



Struktur Organisasi



Kiagus Ahmad Badaruddin

Inspektur Jenderal



Sofandi Arifin

Sekretaris Itjen

Dukungan Pengawasan



Elman Ritonga

Inspektur I

DJP



Setiawan Basuki

Inspektur II

DJBC



Alexander Z.

Inspektur III

DJPb dan DJPPR



Bambang K.

Inspektur IV

DJKN dan BKF



Riza Helmi

Inspektur V

DJA, DJPK, Belanja Modal



Wahjoe T.K.

Inspektur VI

Setjen, BPPK



Roberth G.

Inspektur VII

Litbang, TI



M. Rahman Ritza

Irbid Investigasi

Investigasi

Visi & Misi

Visi

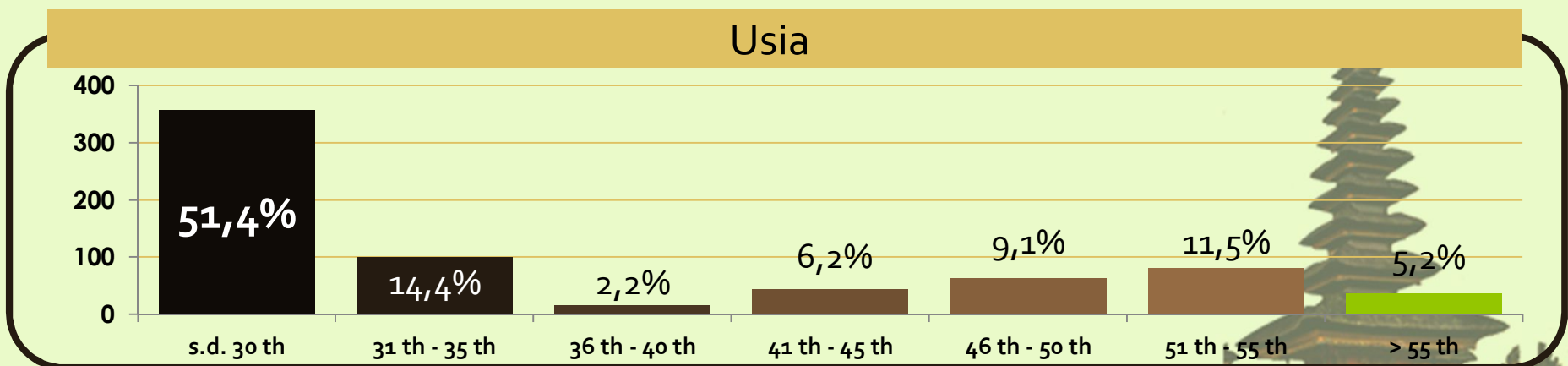
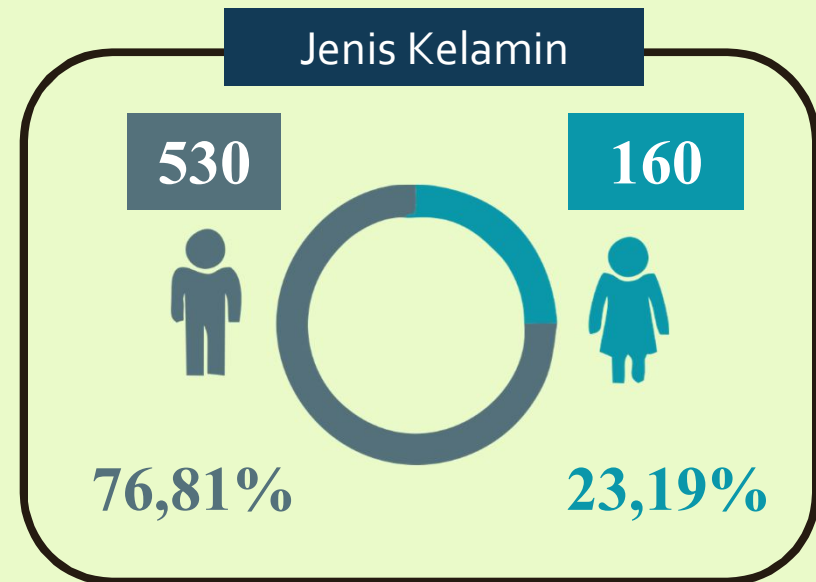
Menjadi unit audit internal yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Negara.

Misi

- **Tata kelola.** Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
- **Efisiensi dan efektivitas.** Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan Kementerian Keuangan.
- **Kepatuhan.** Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- **Akuntabilitas.** Mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Layanan.** Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
- **Integritas.** Mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sumber Daya Manusia

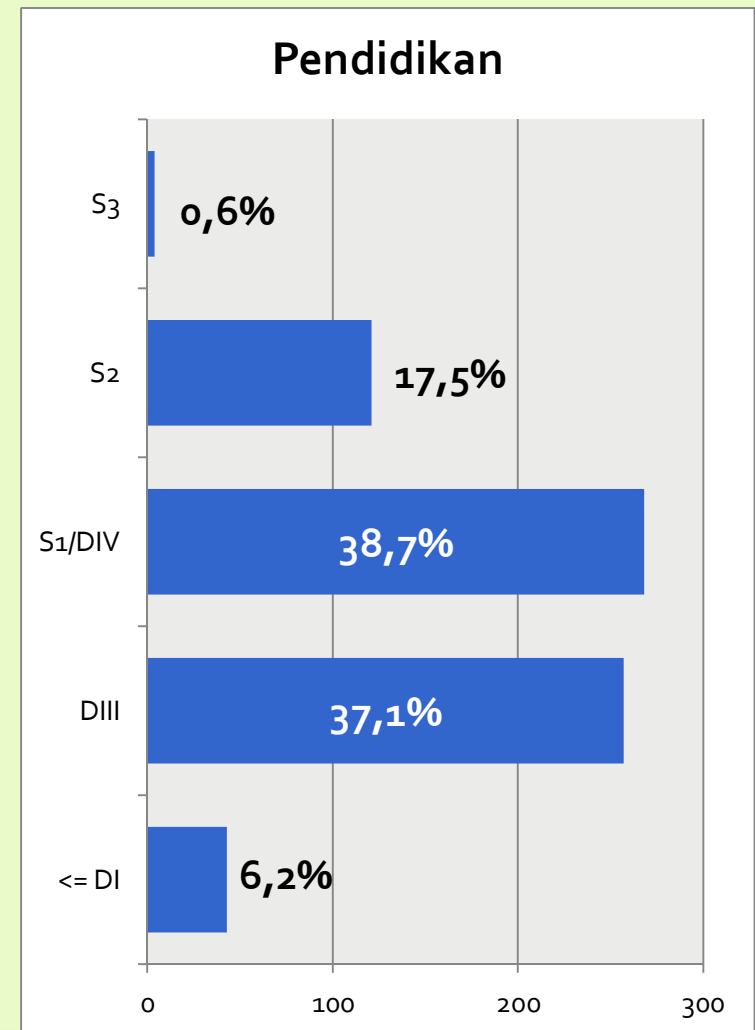
Jabatan	Jumlah
Auditor Utama	4
Auditor Madya	49
Auditor Muda	65
Anggota Tim	173
Pejabat Struktural	47
Non Auditor	352
Jumlah	690



Sumber Daya Manusia

Sertifikasi Internasional

Jenis Sertifikasi	Jumlah
CFE (Certified Fraud Examiner)	40
CIA (Certified Internal Auditor)	15
CISA (Certified Information System Auditor)	13
CEH (Certified Ethical Hacker)	5
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)	1
CHFI (Certified Hacking Forensic Investigator)	1
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	3
CEP (Certified Estimating Professional)	7
OCA (Oracle Certified Associate)	1
CCSA (Certification in Control Self-Assessment)	4
OCP (Oracle Certified Professional)	1
CSOX (Certified in Sarbanes-Oxley)	3
JUMLAH	94



Peta Strategi

Stakeholder/
Customer Perspective

1 Pengendalian mutu yang efektif

1. Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BUN
2. Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

2 Penegakan hukum yang efektif

1. Persentase informasi perbuatan koruptif yang dilaporkan ke KPK/penegak hukum
2. Persentase rekomendasi hukuman disiplin yang ditindaklanjuti

3 Kepuasan pemangku kepentingan yang tinggi

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Internal Process
Perspective

4 Inovasi proses bisnis pengawasan yang efektif

1. Persentase penerapan audit TI
2. Persentase implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) menuju *continuous audit*

5 Implementasi pengawasan yang berkualitas

1. Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM)
2. Nilai rata-rata hasil reviu standar audit AAIP
3. Persentase investigasi yang terbukti (IBI)

Jumlah IKU tahun 2016
17 IKU

Learning and Growth
Perspective

6 SDM yang kompetitif

1. Persentase pemenuhan standar *soft* dan *hard competency*

7 Organisasi yang kondusif

1. Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan
2. Tingkat penerapan pengendalian intern
3. Persentase rekomendasi auditor eksternal yang ditindaklanjuti

8 Sistem manajemen informasi yang andal

1. Persentase pemanfaatan Sistem Manajemen Audit dalam penugasan pengawasan
2. Persentase *Downtime* sistem TIK

9 Pengelolaan anggaran yang optimal

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tentang CBOK

- Future
- Global Perspective
- Governance
- Management
- Risk
- Standards & Certifications
- Talent
- Technology

FAKTA SURVEY

Responden	14,518*
Negara	166
Bahasa	23

LEVEL PEGAWAI

Chief audit executive (CAE)	26%
Direktur	13%
Manajer	17%
Staf	44%

*Tingkat respon berbeda untuk tiap pertanyaan.



Respon survei dikumpulkan sejak 2 Februari 2015 hingga 1 April 2015

Agenda

- 1 Peran Auditor Internal di Sektor Publik
- 2 Pengaruh Kurangnya Pendanaan
- 3 Ancaman terhadap Independensi dan Objektivitas
- 4 Risiko-risiko yang Baru dan Berubah
- 5 Kurangnya Dana untuk Teknologi
- 6 Penggunaan Standar
- 7 Menarik dan Memelihara Talenta



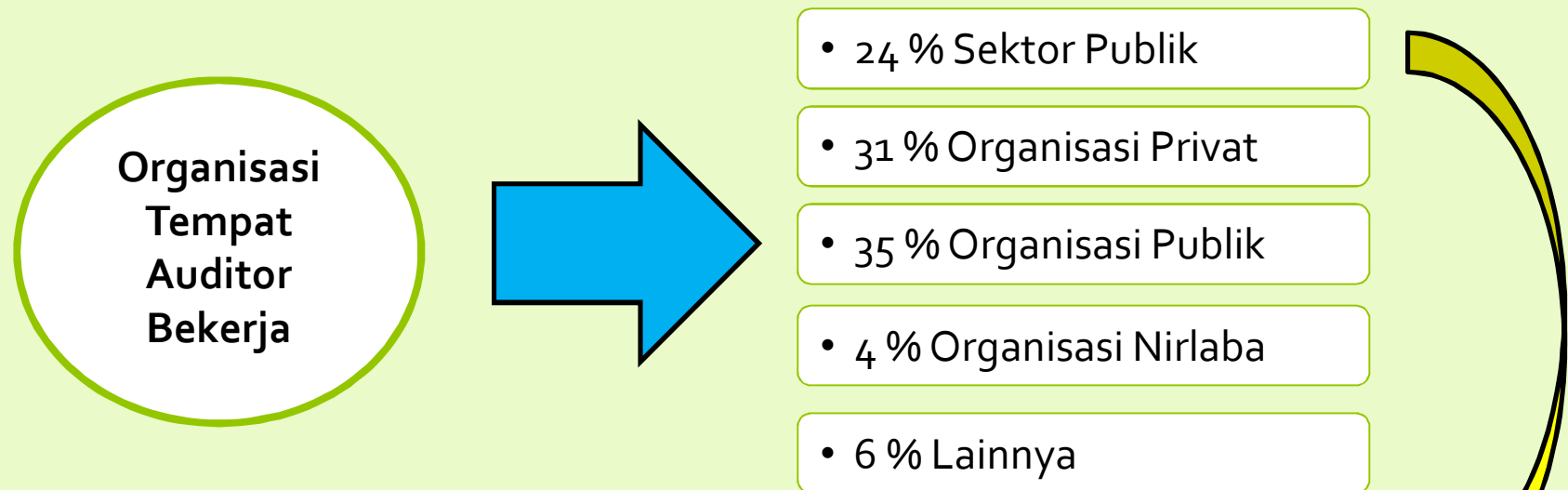
2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



Peran Auditor Internal di Sektor Publik



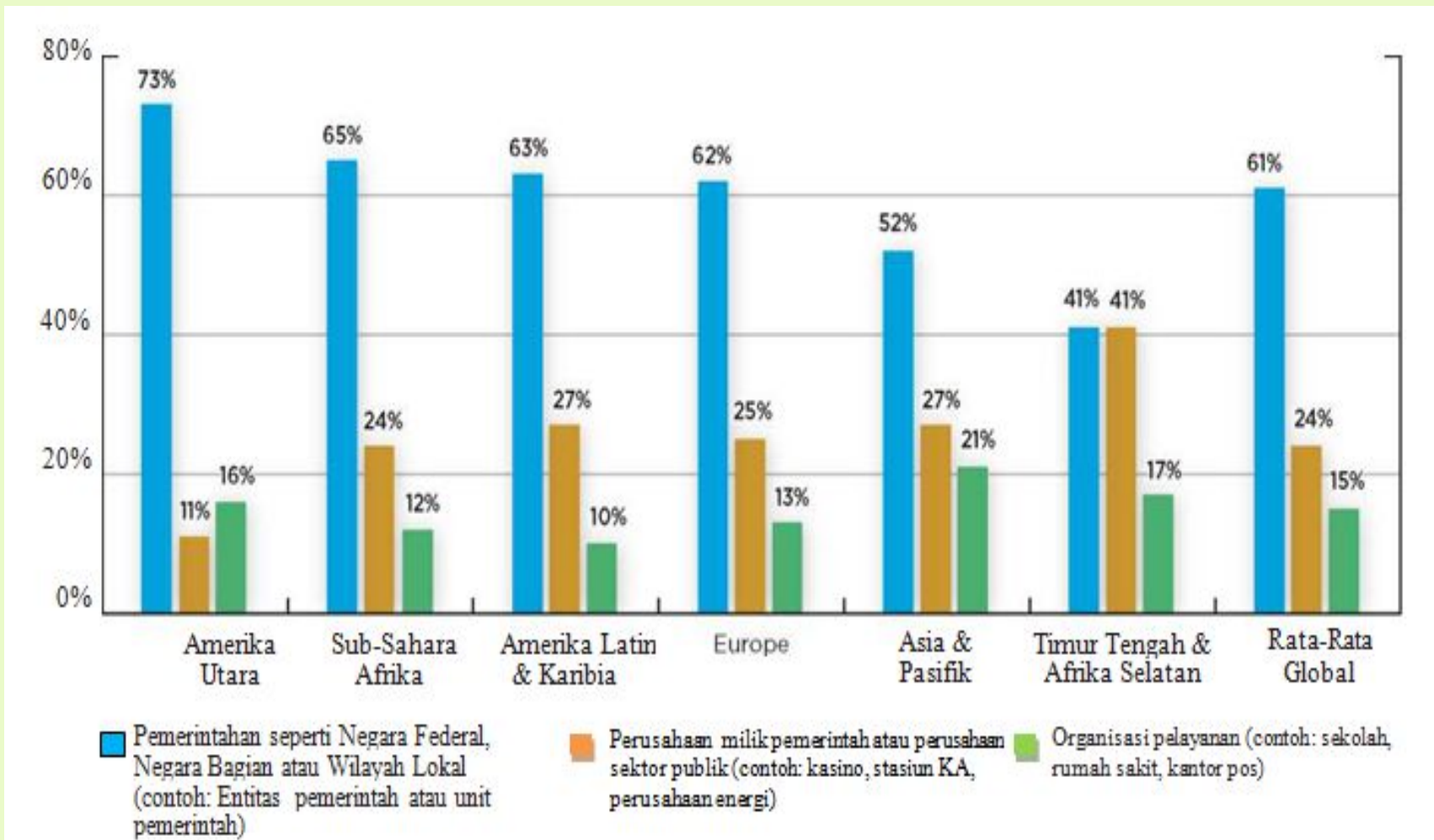
Peran Auditor Internal Sektor Publik



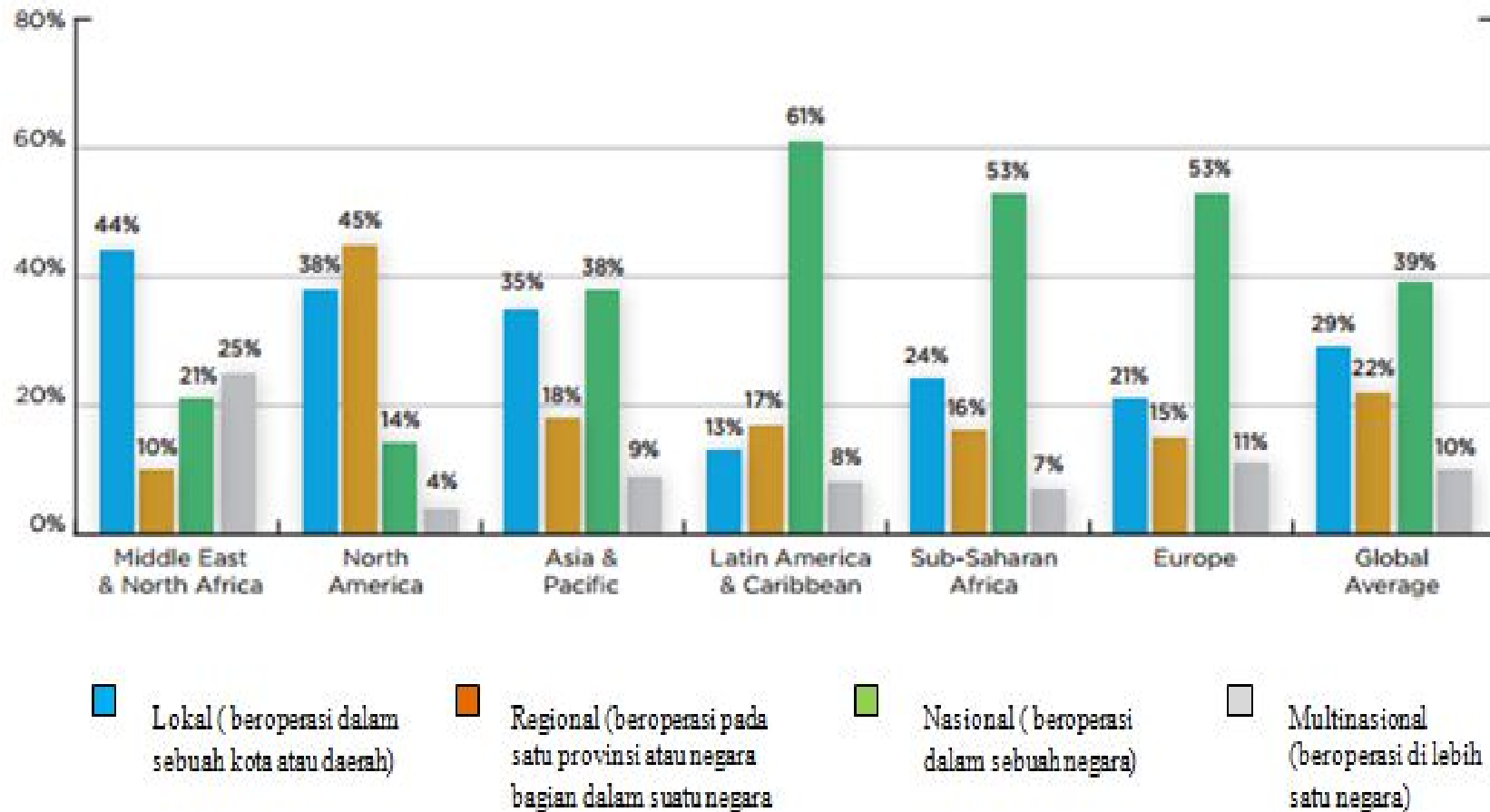
Audit internal sektor publik memiliki posisi yang unik berkenaan dengan pelayanannya kepada pemangku kepentingan.

Tidak hanya harus memuaskan kebutuhan pemimpin, direktur, manajer divisi, dan regulator, mereka juga seringkali harus menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan pemangku kepentingan politis dan pemangku kepentingan masyarakat.

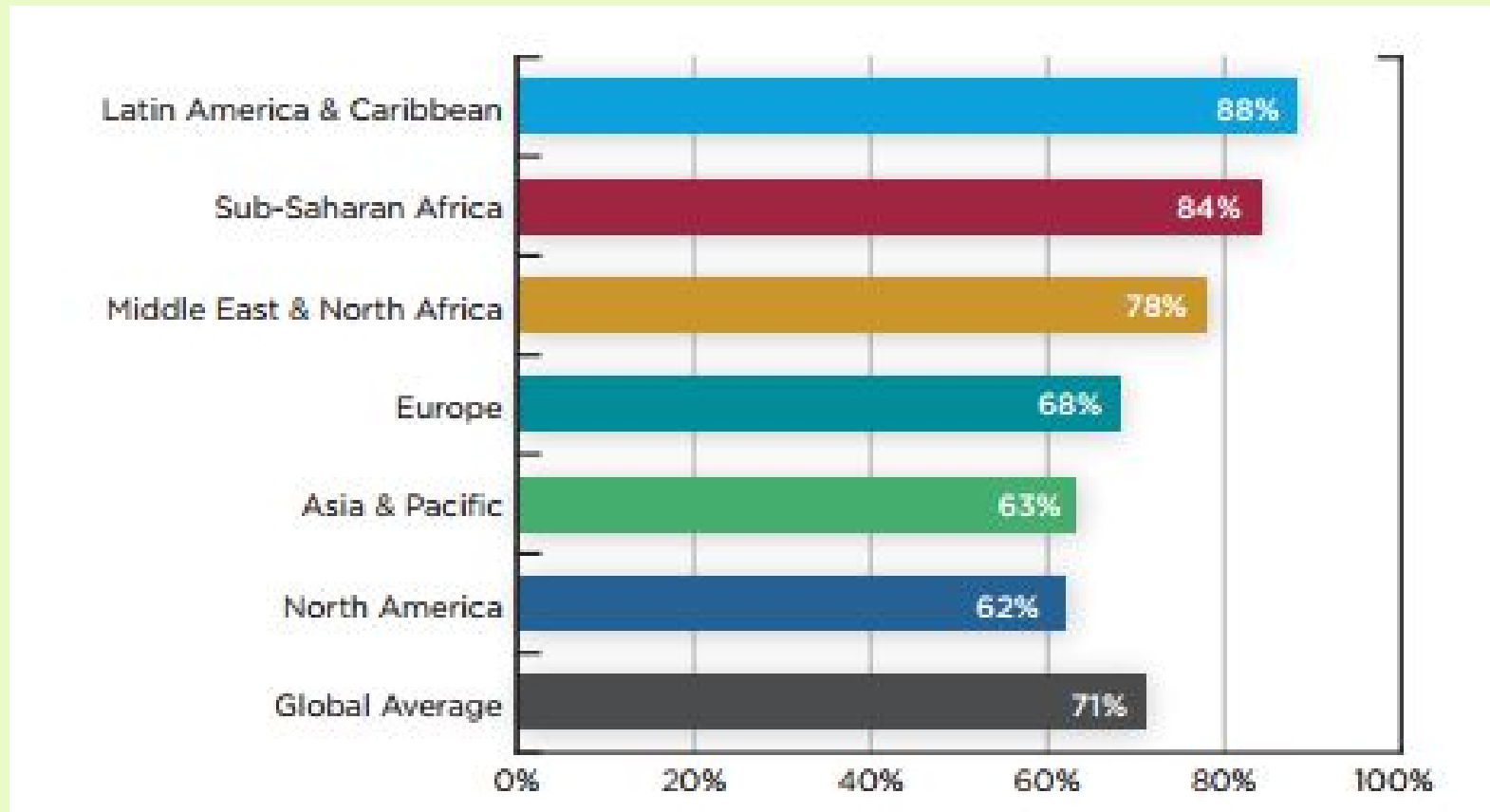
Area Auditor Internal Sektor Publik Bekerja



Level Pemerintahan Auditor Internal Bekerja

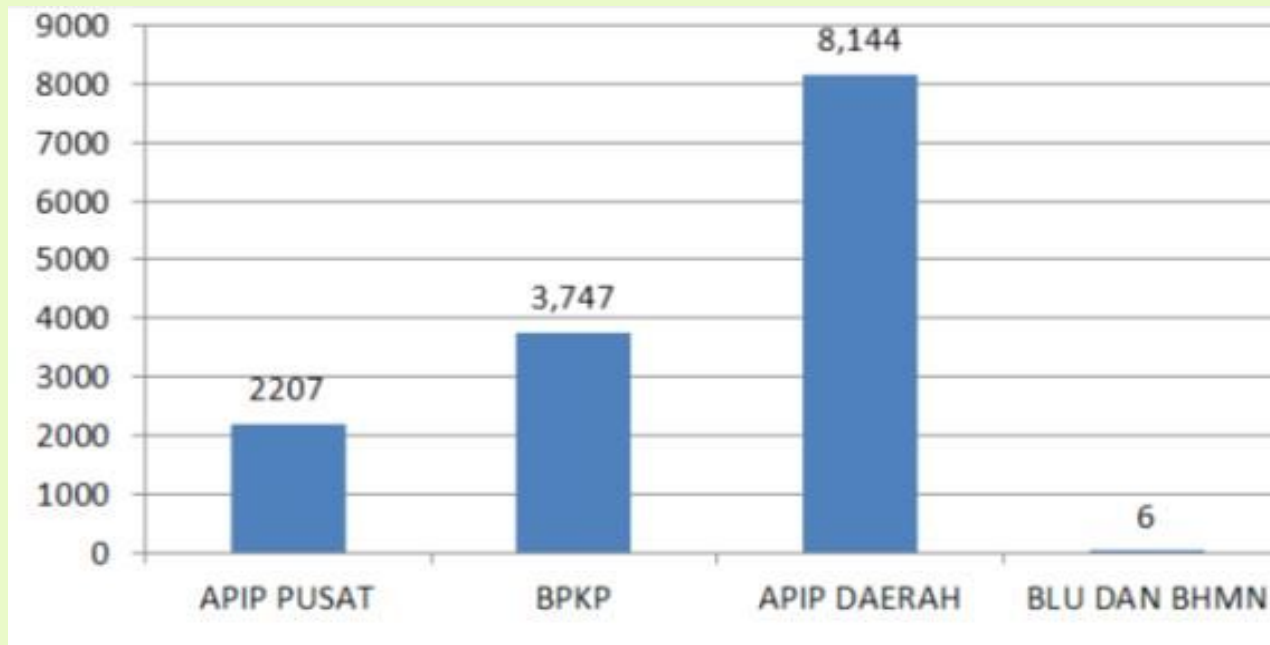


Keberadaan Auditor Internal Berdasar Mandat Hukum



Keberadaan Auditor Internal Sektor Publik di Indonesia

Posisi 30 Juni 2014



Sumber: Pusbin JFA



2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



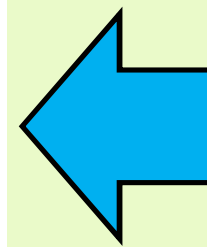
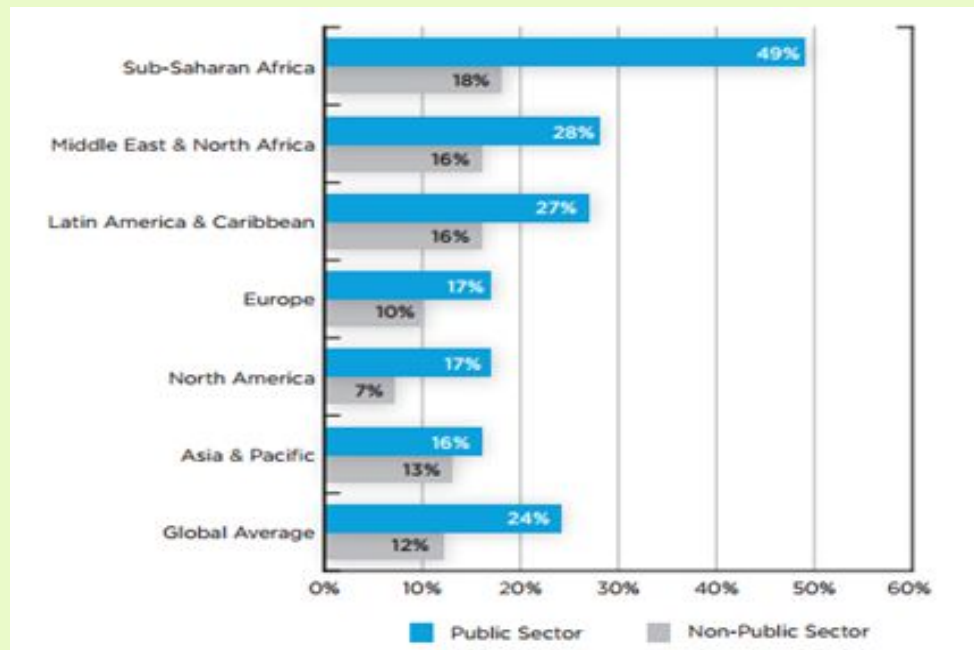
Pengaruh Kurangnya Pendanaan



Kurangnya Pendanaan pada Unit Audit Internal

Sebagian besar pemerintahan di seluruh dunia mengurangi pendanaan untuk pelayanan publik setelah terjadinya krisis finansial pada tahun 2007/2008.

Sekitar sepertiga dari *Chief Audit Executive* (CAE) sektor publik mengatakan anggaran mereka naik 34% dibandingkan tahun lalu, meskipun masih tertinggal dari sektor nonpublik yang naik sebesar 42%.



Ketidakcukupan pendanaan Unit Audit Internal pada berbagai wilayah

Berkurangnya Pendanaan pada Unit Audit Internal Pemerintah Indonesia



Pemerintah Indonesia mengurangi lagi belanja APBN dengan Rp133,8 T.

Prioritas yang dikurangi adalah belanja Non Operasional termasuk perjalanan dinas → Perjalanan dinas merupakan salah satu komponen utama dalam penugasan auditor sektor publik → Dilakukan penyesuaian: mengurangi *coverage* dan/atau kedalaman audit.





2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



Ancaman terhadap Independensi dan Objektivitas



Ancaman terhadap Independensi dan Objektivitas



Salah satu peran utama audit internal adalah memberikan asurans yang objektif kepada pemangku kepentingan

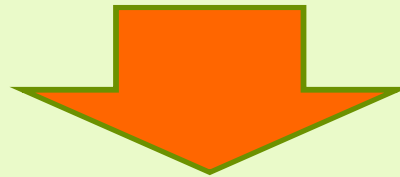
Cara yang paling penting untuk mencapai hal tersebut ialah dengan dipandang sebagai pihak yang independen terhadap manajemen dan pemangku kepentingan lainnya – sesuatu yang lebih mudah diucapkan dibanding dilakukan.

Hal di atas juga dipengaruhi dengan keberadaan Komite Audit

Secara global, rata-rata sebesar 67% responden sektor publik menyatakan bahwa mereka memiliki **Komite Audit**, apabila dibandingkan dengan 83% responden dari sektor nonpublik.

Ancaman terhadap Independensi dan Objektivitas

Masalah struktur **Komite Audit** dapat mengancam independensi audit internal dan kemampuan dalam memberikan asurans yang objektif.



Di Tanzania, contohnya, Aturan Keuangan Publik menyatakan bahwa **Komite Audit** sektor publik harus diisi oleh anggota senior dari tim manajemen – orang-orang yang akan diaudit. Situasi ini menjadi sebuah tantangan.

Direktur Pelaksanaan Audit di Tanzania mengatakan bahwa organisasi perlu fokus dalam melakukan edukasi terkait peran **Komite Audit** dalam audit internal, yang mungkin mempengaruhi keahlian dan mendukung pihak luar.

Ancaman terhadap Independensi dan Objektivitas: Bagaimana di Indonesia?



BPKP memperkenalkan model IACM sesuai Perka BPKP Nomor 1633/ K/JF/2011 s.t.d.d. 16 tahun 2015 lampiran I halaman 103 *Key Process Area* elemen VI. Struktur dan Tatakelola level 4: Adanya pengawasan terhadap APIP oleh pihak independen.



Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan pembentukan Komite Audit Kementerian Keuangan dengan keanggotaan mencakup pihak independen dari luar organisasi/manajemen.



2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE

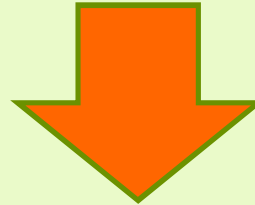


Risiko-risiko yang Baru dan Berubah



Risiko-risiko yang Baru dan Berubah

Area risiko yang cepat berubah seperti ancaman dunia maya, peristiwa geopolitik, dan kekacauan ekonomi domestik telah memberikan kesempatan bagi unit audit internal sektor publik bukan hanya mengaudit kinerja organisasi, tetapi juga ikut serta mengetahui risiko-risiko yang baru dan berubah.



Fokus risiko pada berbagai wilayah

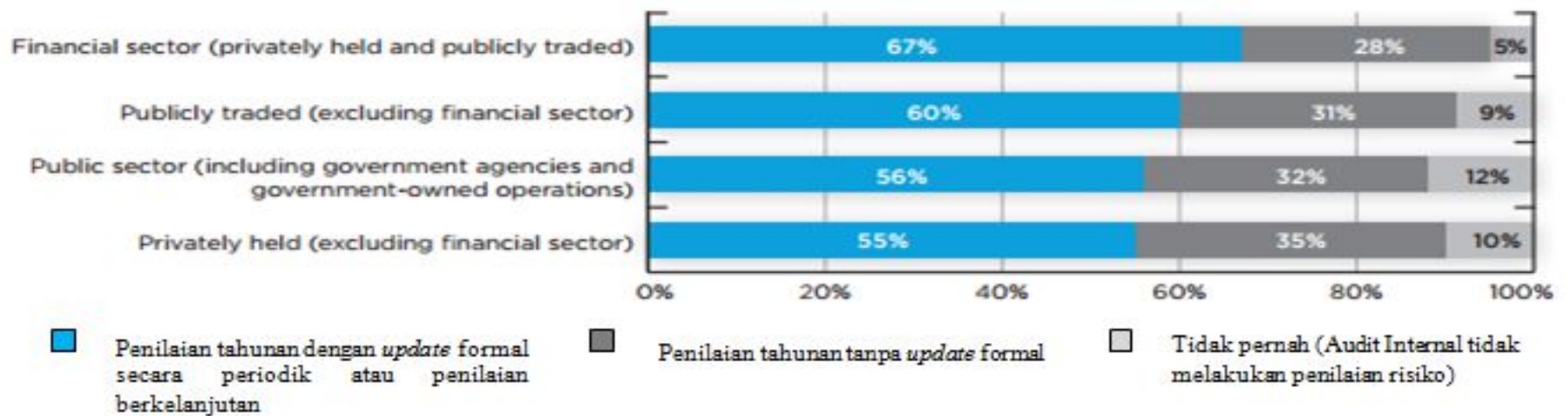
Fokus Risiko	Amerika Utara	Eropa	Africa bagian Sahara	Timur Tengah & Afrika Utara	Asia & Pasifik	Amerika Latin & Karibia	Rata-rata Global (Sektor Non Publik)
Operasional	86%	81%	76%	76%	75%	64%	78%
Ketaatan/ Kepatuhan	67%	61%	68%	57%	63%	82%	71%
Assurance Manajemen Risiko/ Efektivitas	51%	62%	70%	41%	73%	57%	58%
Risiko Strategi Bisnis	45%	51%	63%	65%	59%	60%	54%
Teknologi Informasi (TI) yang tidak masuk dalam audit lain	54%	54%	39%	53%	47%	56%	55%

Risiko-risiko yang Baru dan Berubah

Idealnya, penilaian risiko di-*update* sepanjang tahun dalam rangka merespon risiko-risiko yang berubah.

- Lebih dari setengah auditor internal sektor publik, melakukan *update* penilaian risiko secara **periodik** atau **berkelanjutan** sepanjang tahun.
- Yang lain menyesuaikan penilaian risiko tahunan, tetapi mereka tidak memiliki *update* secara formal sepanjang tahun, yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap risiko-risiko yang berubah.

Frekuensi Penilaian Risiko Berdasarkan Tipe Organisasi



Risiko-risiko Baru yang Berubah: Bagaimana Audit Intern Kementerian Keuangan?



Penilaian risiko auditan dilakukan setiap tahun dalam rangka perencanaan berbasis risiko. Auditan melakukan penilaian risiko setidaknya setengah tahun sekali.

Register risiko dari auditan dijadikan salah satu sumber auditor internal Kementerian Keuangan dalam menilai risiko auditan.





2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



Kurangnya Dana untuk Teknologi

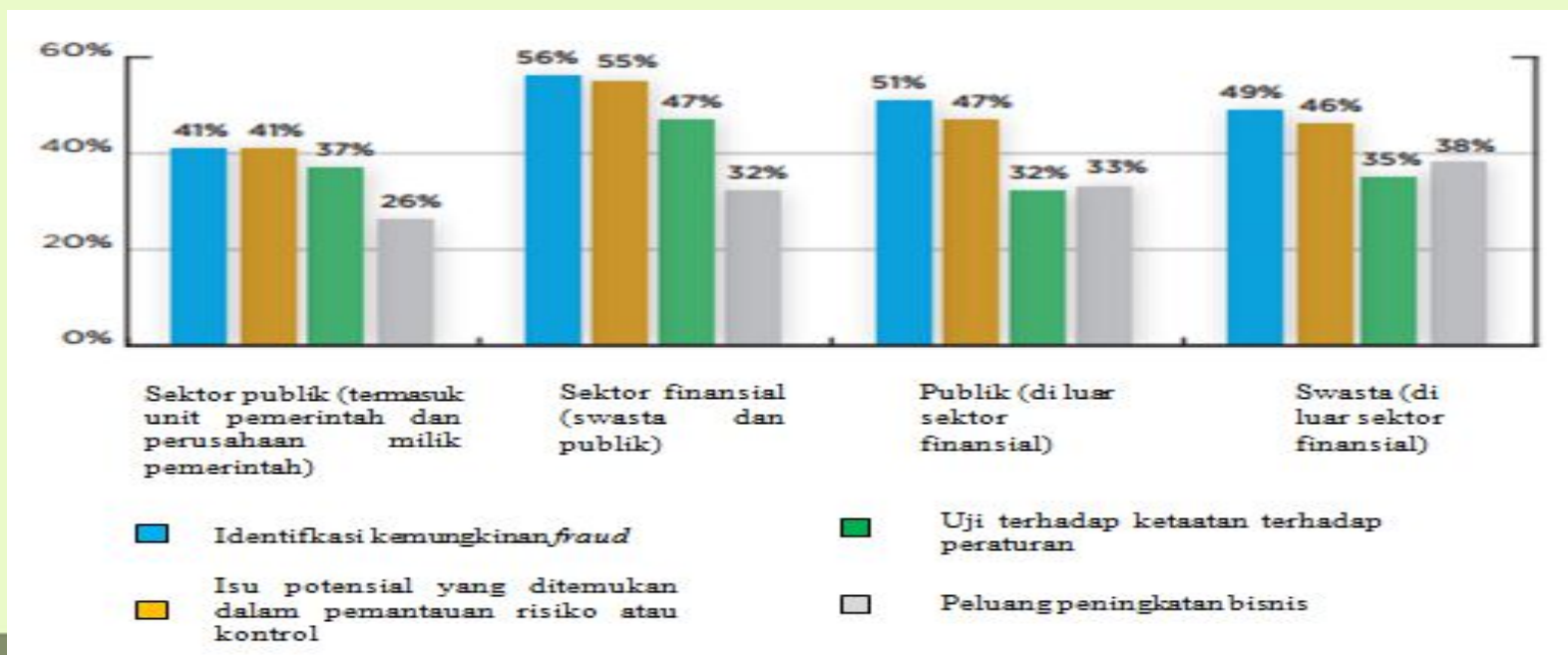


Kurangnya Dana untuk Teknologi

Auditor internal dalam sektor publik kurang aktif dalam menggali dan menganalisis data dibandingkan dengan auditor di organisasi lain khususnya dalam hal identifikasi kemungkinan *fraud* dan memantau risiko /pengendalian.



Perbandingan Penggunaan Analisis Data Berdasarkan Tipe Organisasi



Kurangnya Dana untuk Teknologi

Para pimpinan unit audit internal sedang berjuang mencari dana untuk diinvestasikan dalam mencari *software* yang sesuai, sehingga dapat memanfaatkan teknologi-teknologi, dan beberapa di antaranya masih dalam proses melatih tim mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut.



Penggunaan teknik dengan data yang banyak juga sangat mahal karena besarnya jumlah data yang harus dihapus sebelum analisis dijalankan.



Terkait teknologi di atas, para auditor harus memastikan bahwa audit mereka selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Kurangnya Dana untuk Teknologi: Bagaimana Audit Intern Kementerian Keuangan?



Pimpinan Kementerian Keuangan sangat menyadari pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam melakukan proses bisnis termasuk dalam melakukan audit.



Pengembangan *continuous audit* dilaksanakan dengan cara seksama dan dana yang memadai.



Pengembangan awal ditekankan pada review atas laporan keuangan untuk menjamin akurasi pelaporan keuangan..



2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



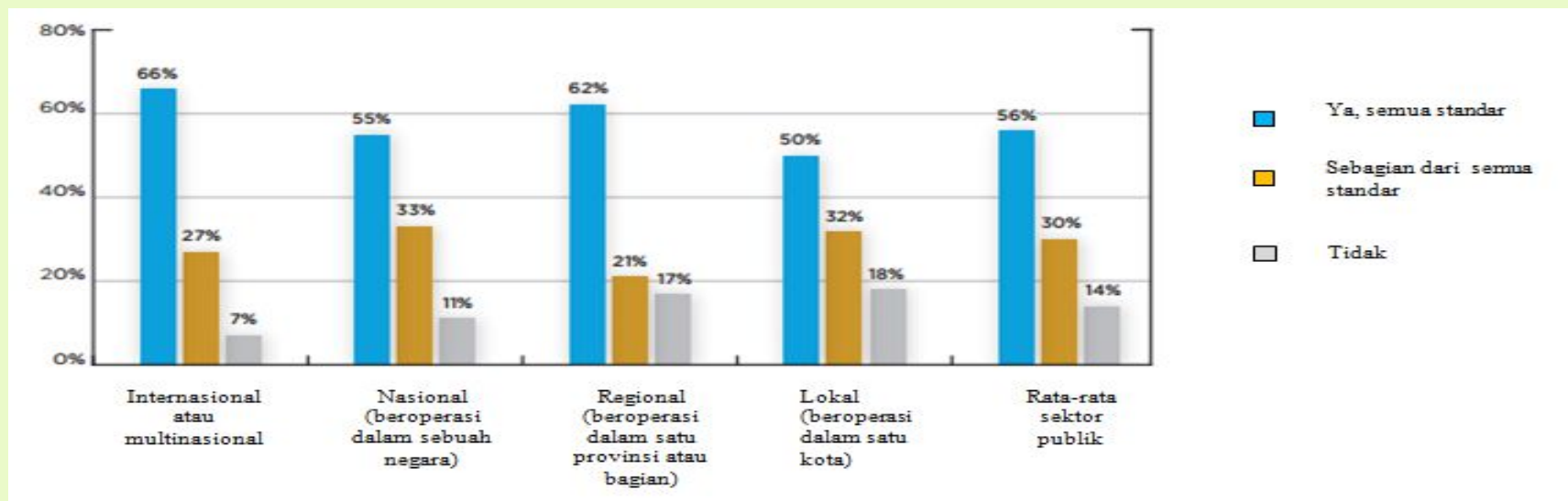
Penggunaan Standar



Penggunaan Standar

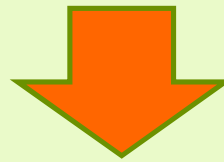
- ❖ Dalam sektor publik, penggunaan Standar dipersulit oleh peraturan pemerintahan atau aturan legal yang berbeda antara level lokal, regional, atau nasional.
- ❖ Umumnya, penggunaan standar paling rendah pada level lokal dan paling tinggi pada level internasional.

Penggunaan Standar pada Berbagai Sektor Publik



Penggunaan Standar

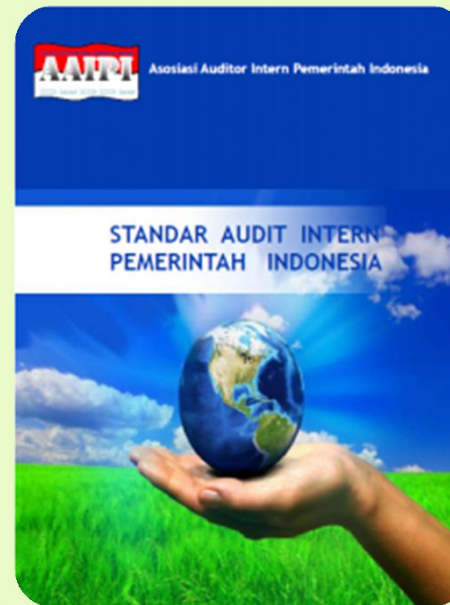
Peraturan daerah dapat mempengaruhi kemampuan audit internal untuk selaras dengan Standar.



Contohnya di Tanzania, dalam Hukum Nasional (*The Public Finance Regulation*), definisi audit internal dan pengendalian internal menyebutkan manajemen risiko dan proses tata kelola, tetapi tidak meliputi kegiatan konsultasi. Hal ini **berbeda dengan** IIA *International Professional Practices Framework* (IPPF) yang fokus pada kepatuhan dan pengawasan keuangan.

Penggunaan Standar: Bagaimana di Indonesia?

AAIPI sebagai asosiasi yang diberi mandat menyusun standar telah menyelesaikan penyusunan standar audit bagi anggotanya.
Standar tersebut sebagaian besar mengacu ke standar IIA





2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



Menarik dan Memelihara Talenta



Menarik dan Memelihara Talenta



- ❖ Di **Meksiko**, banyak departemen pemerintahan yang mengurangi anggaran audit internal yang berakibat pelatihan sulit dilaksanakan.
- ❖ Langkah-langkah penghematan oleh lembaga pemerintahan secara global berakibat pembatasan dalam pemberian bonus kepada karyawan.
- ❖ Perusahaan sektor swasta mampu memikat auditor sektor publik yang paling berbakat dengan memberi upah yang lebih baik.
- ❖ Perlu diketahui, kelebihan bekerja di sektor publik ialah mutu dari pelatihan yang diterima oleh pegawai.
Organisasi sektor publik pada beberapa negara mendukung pelatihan untuk pegawai sampai dengan mutu yang ingin dicapai, meskipun hal tersebut mungkin masih belum cukup mampu untuk mengimbangi perubahan zaman yang begitu cepat.

Menarik dan Memelihara Talenta : Bagaimana Audit Intern Kementerian Keuangan?



- ❖ Kesempatan training dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas auditor intern sangat terbuka.
- ❖ Langkah-langkah penghematan karena kondisi akhir-akhir ini membuat beberapa program ditunda.
- ❖ Tingkat retensi adalah baik.



Simpulan

- ❖ Auditor internal sektor publik diharuskan berhadapan dengan pihak pemangku kepentingan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik pada lembaga pemerintah.
- ❖ Hal tersebut mendorong meningkatnya permintaan atas layanan audit internal padahal pada saat yang sama unit audit internal mengalami kekurangan dana.
- ❖ Dengan adanya tantangan tersebut, auditor internal sektor publik tetap terlibat dengan risiko organisasinya dan menggunakan standar yang tinggi.
- ❖ Audit intern di Indonesia khususnya Kementerian Keuangan masih terus bergerak ke arah pemenuhan standar internasional praktik audit intern meskipun menghadapi tantangan pendanaan yang sama dengan organisasi audit intern di seluruh dunia.



2016 IIA INDONESIA 6-8 SEPTEMBER
NATIONAL CONFERENCE



WILAYAH REGIONAL
MESA DUA, BALI
INDONESIA

Terima Kasih

